

**DAMPAK PEMEKARAN KEPENGHULUAN TERHADAP PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR KEPENGHULUAN SUNGAI MAJO PUSAKO KECAMATAN  
KUBU BABUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2015-2016**

**Oleh : Rasihan Setia Bahar**

Email : rasihanbahar99@gmail.com

**Pembimbing : Rury Febrina, S.IP., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Kepenghuluan Sungai Majo Pusako is one of the Pemekaran villages in Kubu Babussalam Subdistrict, Rokan Hilir Regency which does not only have a Positive impact on the Implementation of the Kepenghuluan Government independently but also a negative impact. the formulation of the problem that can be taken is what is the impact of the expansion of Kepenghuluan on the Development of the Majo Pusako River and what are the factors that influence the development in Kepenghuluan Majo Pusako River. This study aims to describe the impact of the expansion of Kepenghuluan on the Development of the Majo Pusako River and to describe the factors that influence the development in Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. This study uses the concept of Arif Roesman Efendy about Regency/ City Region Expansion. Primary information sources (informants) are determined by purposive sampling and the data needed is collected by interview and literature study techniques.*

*The impact of Kepenghuluan P separation is intended for the construction of transportation facilities in Kepenghuluan Sungai Majo Pusako has not been carried out properly. Problems The construction of irrigation facilities in Kepenghuluan Sungai Majo Pusako is more directed to irrigation facilities to increase the yield of community rice, Training and guidance facilities, work skills and capital need to obtain support from the Rokan Hilir District Government, the community felt a very positive impact, namely the ease of obtaining business capital assistance. With comprehensive and integrated social development, the life of rural communities will improve the welfare of life in a sustainable manner. The first focus of the Government of Kepenghuluan Majo Pusako River is on the development of Health Services infrastructure. Development that focuses on building infrastructure that can help people to carry out every religious activity. Factors influencing Development in Kepenghuluan Sungai Majo Pusako are the Boundary Area of Conflict Limit, Ownership Status, namely Kepohuluan Sungai Majo Pusako Office Still renting from the community since 2015-2016. Infrastructure problems in Kepenghuluan Majo Pusako River caused complaints from the public with increasing operational costs and daily living expenses in Kepenghuluan Majo Pusako River.*

*Keywords: Impact, Kepenghuluan, Development*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pemekaran Desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah Desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat. Pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi dan Otonomi Desa. Kebijakan ini merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Dengan kata lain, hakekat pemekaran Daerah Otonom lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran wilayah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kepenghuluan Pulau Halang Hulu, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu dan Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir<sup>1</sup>. Pada pasal 1 dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir yang dimaksud dengan Kepenghuluan adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan salah satu Kepenghuluan Pemekaran yang ada di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi jumlah total 786 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 371 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 415 jiwa. Mata pencarian Penduduk Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Mayoritas sebagai Petani Kebun Kelapa Sawit Sekitar 117 Kepala KK dari Total Penduduk 200 KK.

Upaya penguatan dana Desa dijelaskan dalam Pasal 4 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang terdiri dari: (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Meskipun anggaran tersebut mengalami kenaikan, akan tetapi banyak permasalahan yang terjadi adalah dalam perkembangan Kepenghuluan Sungai

---

<sup>1</sup>Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya,

Kepenghuluan Pulau Halang Hulu, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu dan Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

Majo Pusako diantaranya timbulnya sengketa pertanahan antar Kepenghuluan Sungai Majo sebagai Kepenghuluan Induk dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako sebagai Kepenghuluan baru adalah bermula dari pengaduan pihak yang berisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun pemilikannya dalam pendaftaran tanah dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku di Kepenghuluan Sungai Majo.

Tujuan pihak yang merasa keberatan adalah bahwa pihak tersebut merasa berhak dari yang lain atas tanah yang dianggap sengketa oleh masyarakat di Kepenghuluan Sungai Majo. Berikut ini adalah identifikasi masalah dari dampak Pemekaran Kepenghuluan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir adalah:

- a. Konflik batas tanah di Kepenghuluan Sungai Majo dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako diantaranya adalah mengenai batas tanah, jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya memperebutkan hak atas tanah. Peran dan fungsi kepala Kepenghuluan atau perangkat Kepenghuluan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bahwa mereka harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya.
- b. Adanya pihak-pihak masyarakat yang tidak menyetujui batas wilayah Kepenghuluan yang telah dibuat oleh Kecamatan,

yaitu batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Majo dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dengan alasan agar kepengurusan administrasi lebih terfokus pada satu wilayah, yaitu Kepenghuluan Sungai Majo.

- c. Kantor Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Masih menyewa dari masyarakat sejak tahun 2015-2016. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan Kepenghuluan hasil dari pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo.
  - d. Belum adanya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Permasalahan infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako menyebabkan terjadinya keluhan dari masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dengan semakin bertambahnya biaya ongkos dan biaya hidup sehari-hari di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Alasan melakukan Penelitian di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dikarenakan Pemekaran Kepenghuluan tidak hanya memberikan dampak Positif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan secara mandiri melainkan juga dampak negatif dimana permasalahan sengketa batas wilayah, pemerataan pembangunan juga terdapat masalah yang lebih penting yaitu kepemilikan kantor Kepenghuluan secara mandiri yang selama ini masih menyewa dari pihak masyarakat.
- Alasan memilih penelitian di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako

Kecamatan Kubu Babussalam bermaksud untuk menelaah persoalan-persoalan terkait dampak Pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dari Kepenghuluan Sungai majo, terutama persoalan infrastruktur maupun suprastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Oleh sebab itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Dampak Pemekaran Kepenghuluan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2016”***.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak pemekaran Kepenghuluan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Tahun 2015-2016?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Tahun 2015-2016?

### **Kerangka Teoritis**

#### **1. Pemekaran Desa**

Pemekaran Desa merupakan sebuah trobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat Desa, serta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang keadilan pemerintah, sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

#### **2. Pembangunan**

Pembangunan sarana-prasarana Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Pedesaan terdiri dari diantaranya:

- a. Prasarana Perhubungan
- b. Prasarana Pengairan
- c. Sarana dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Desa
- d. Sarana Pengadaan Alat Produksi dan Kebutuhan Lainnya
- e. Sarana Pelatihan dan Bimbingan Keterampilan
- f. Sarana dan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran
- g. Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan
- h. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
- i. Sarana dan Prasarana Sosial, Budaya dan Agama

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dampak Pemekaran Kepenghuluan terhadap Pembangunan Infrastruktur Kepenghuluan Sungai Majo Pusako**

##### **1. Prasarana Perhubungan**

Prasarana perhubungan memiliki prioritas paling tinggi dalam pembangunan suatu Desa. Prasarana perhubungan yaitu Jalan, Jembatan, serta sarana angkutan yang memadai, yang mana mampu menjamin akses masyarakat keluar masuk antar Desa dengan tempat-tempat lainnya. Pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya dalam menunjang perhubungan sehingga dapat menghindari pembangunan yang gagal

dan menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan. Permasalahan Prasarana Perhubungan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako masih terjadi sebelum dan sesudah pemekaran dimana banyaknya kondisi jalan yang rusak. Jenis pembangunan sarana perhubungan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako tahun 2016. Penyerapan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana perhubungan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako terlaksana dengan baik. Pembangunan suatu wilayah terutama Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan terhadap untuk percepatan perkembangan suatu Kepenghuluan.

Penyebab terjadinya pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo Pusako adalah Pembangunan Sarana dan prasarana Perhubungan yang tidak merata, artinya terjadi sebuah kesenjangan pembangunan, pemekaran yang terjadi dapat memberikan dampak yang positif bagi perkembangan. Sarana perhubungan sangat penting karena sangat menentukan kelancaran arus produksi masyarakat setempat serta mendorong kelancaran arus masuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan sendiri. Selain itu agar masyarakat tidak tertinggal dari kehidupan modern maka prasarana perhubungan, telekomunikasi dan penerangan juga harus lancar diperoleh masyarakat pedesaan.

## **2. Prasarana Pengairan**

Prasarana pengairan bersifat fundamental bagi pembangunan pedesaan yang pada umumnya mayoritas bekerja sebagai petani, jaringan pengairan dapat mendukung usaha pertaniannya yang berproduksi secara berkesinambungan yang berdampak pada peningkatan Ekonomi Masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Peningkatan sarana Pengairan merupakan sebuah upaya Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dalam hal penyediaan infrastruktur khususnya prasarana pengairan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Pembangunan tersebut dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

Pembangunan sarana pengairan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako tahun anggaran 2015 dialokasikan untuk pembangunan Sumur dengan Pompa dan pada tahun 2016 di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako adalah lebih diarahkan ke sarana irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian padi masyarakat di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Perubahan pembangunan infrastruktur sebelum dan setelah pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo Pusako yang berupa sarana irigasi persawahan dan rehabilitasi sarana irigasi persawahan yang semakin baik melihat dari dampak pembangunan prasarana irigasi di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako memberikan dampak positif terhadap distribusi penjualan hasil-hasil pertanian padi di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

Permasalahan sarana pengairan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah

Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, melainkan juga tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Inisiatif dan semangat dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur penting menjadi motivasi Kepenghuluan Sungai Majo Pusako untuk bisa melakukan peningkatan pembangunan terutama sarana dan prasarana pengairan.

### **3. Sarana dan Fasilitas Pendukung Ekonomi Desa**

Beberapa fasilitas/sarana yang mungkin dibutuhkan, memiliki prioritas yang cukup tinggi mengingat peranannya sangat menentukan dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat desa antara lain, sarana penyediaan alat-alat/bahan produksi, sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja, fasilitas permodalan usaha, dan fasilitas pemasaran hasil-hasil produksi. Berkembangnya struktur ekonomi, munculnya aktivitas perekonomian lain sebagai sumber pekerjaan baru, misalnya berdagang, transportasi umum (jasa), dan lain sebagainya. Yang tentunya juga berarti peningkatan pendapatan bagi masyarakat dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru. Anggaran pemberdayaan masyarakat diberikan bagi kelompok ternak sapi dan pelatihan pengolahan pertanian di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Peningkatan Ekonomi Kepenghuluan Sungai Majo Pusako penting dilakukan hal ini diakibatkan dari dampak pemekaran dari Kepenghuluan Sungai Majo. Kepenghuluan sungai majo dituntut untuk mengejar ketertinggalan dengan Kepenghuluan yang lain yang telah terlebih dahulu maju.

Pentingnya pelatihan bagi masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako meningat sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja, fasilitas permodalan usaha, dan fasilitas pemasaran hasil-hasil produksi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja dan permodalan perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terlebih lagi jika dipandang tidak adanya konsistensi kebijakan yang mendukung sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja dan permodalan, sehingga perlu dilakukan peningkatan dalam memajukan Perekonomian Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir.

Sarana dan fasilitas pendukung ekonomi desa bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi itu sendiri, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, serta diperolehnya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sarana dan fasilitas pendukung ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, sehingga akan diperoleh kapasitas produktif dari sumber daya manusia, serta diperolehnya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

#### **4. Sarana dan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran**

Permasalahan permodalan dan pemasaran hasil produksi masih menjadi kendala yang cukup serius yang dihadapi dalam upaya mengembangkan perekonomian desa. Untuk itu perlunya akses permodalan bagi masyarakat untuk mengembangkan skala usahanya masing-masing.

Bantuan pelatihan merupakan solusi Permasalahan permodalan dan pemasaran hasil produksi masih menjadi kendala yang cukup serius yang dihadapi dalam upaya mengembangkan perekonomian Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Bimbingan dan pelatihan bagi kelompok tani di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Dampak yang terjadi sangat signifikan terlihat dari pembangunan Sarana dan Fasilitas Permodalan dan Pemasaran. Dimana masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal usaha. Untuk itu Pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan Pemerintah Kepenghuluan tetapi juga harus memperhatikan respon dari masyarakat. Masyarakat yang menjadi elemen terpenting dalam pelaksanaan pembangunan berhak merespon terhadap rencana pembangunan, proses pembangunan, dan hasil pembangunan. Respon masyarakat dapat dibagi atas dua yaitu respon positif dan negatif.

#### **5. Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan**

Dengan pembangunan sosial yang komprehensif dan terpadu,

bersamaan dengan pembangunan ekonomi yang produktif maka gerak kehidupan masyarakat pedesaan akan berkembang kedepan, meningkatkan kesejahteraan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan juga harus didasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya sehingga dapat menghindari pembangunan yang gagal dan menimbulkan citra yang buruk bagi pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako sebagai pelaksana pembangunan. Setelah terjadi pemerkeran desa maka setiap pemerintah desa memiliki kekuasaan penuh untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan dibawah pengawasan dari pemerintah pusat.

Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan di Dusun satu Desa Lubuk Raja, sedangkan Dusun 2,3, dan 4 tidak dilakukan penggalian gagasan. Hal ini perlu adanya Pengkajian Keadaan Desa secara menyeluruh dari Dusun 1-4, dimana pada dasarnya setiap dusun memiliki potensi serta kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah Kepenghuluan dalam melaksanakan pembangunan dimana hanya diawasi oleh Pemerintah Pusat.

Masyarakat memperoleh dampak positif atas adanya pemekaran pada elemen Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan, dimana Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan dapat membantu kelancaran kegiatan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat juga harus berperan aktif mengawasi setiap kegiatan pembangunan terutama dalam hal Sarana dan Prasarana Pembangunan Sosial Pedesaan dan pemerintah

Kepenghuluan juga harus menggandeng masyarakat untuk ikut serta mengambil peran dalam upaya pembangunan Kepenghuluan.

## **6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan**

Sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dalam hal jumlah maupun kualitas adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda. Dalam rangka pembangunan masyarakat desa untuk menikmati taraf kehidupan yang layak. Pembangunan Posyandu sebagai Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan sebuah upaya peningkatan pelayanan Kesehatan yang lebih efektif, efisien dan transparan. Pembangunan yang dikatakan pembangunan yang berhasil atau baik adalah pembangunan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.

Sejak pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo Pusako maka Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan Pemerintah Kabupaten Rokan sangat memperhatikan pembangunan sarana pelayanan Kesehatan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako sangatlah tertinggal dibandingkan Kepenghuluan lain di Kabupaten Rokan Hilir sehingga fokus Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako yang pertama adalah terhadap pembangunan infrastruktur Pelayanan Kesehatan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

## **7. Sarana dan Prasarana Sosial, Budaya dan Agama**

Komunitas masyarakat desa merupakan sebuah kehidupan sosial yang anggota masyarakatnya saling berinteraksi sehari-hari secara intensif, berkepentingan untuk menjalin dan memelihara keharmonisan diantara mereka.

Pembangunan prasarana keagamaan dalam suatu masyarakat desa, sesungguhnya bermakna pula membangun masyarakat itu sendiri, yaitu dalam dimensi spiritualnya yang beriringan dengan dimensi kehidupan materil. Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Pembangunan sarana keagamaan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako tahun 2015-2016 dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako terlaksana dengan baik.

Pembangunan yang telah dilaksanakan adalah pembangunan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur keagamaan yang dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan setiap kegiatan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan dalam hal ini lebih diperuntukkan bagi sarana sosial. Hal ini penting karena pembangunan prasarana sosial budaya dan keagamaan merupakan sesuatu yang urgen dalam menyelesaikan permasalahan di Kepenghuluan baru di Kabupaten Rokan Hilir.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako**

### **1. Konflik Batas Wilayah**

Konflik batas tanah di Kepenghuluan Sungai Majo dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako

diantaranya adalah mengenai batas tanah, jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya memperebutkan hak atas tanah. Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako hendaknya menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran dan fungsi kepala Kepenghuluan atau perangkat Kepenghuluan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi bahwa mereka harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator yang berusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar warganya.

## **2. Perbedaan Agenda Tujuan dan Aktor Terkait**

Adanya pihak-pihak masyarakat yang tidak menyetujui batas wilayah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako yang telah dibuat oleh Kecamatan, yaitu batas wilayah antara Kepenghuluan Sungai Majo dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dengan alasan agar kepengurusan administrasi lebih terfokus pada satu wilayah, yaitu Kepenghuluan Sungai Majo. Batas wilayah yang bermasalah terdiri dari tiga rumah, yang pada dasarnya merupakan wilayah defenitif Kepenghuluan Sungai Majo Pusako akan tetapi tidak mau bergabung dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan memilih bergabung dengan wilayah Kepenghuluan Induk yakni Kepenghuluan Sungai Majo. Warga yang Rumahnya terletak di kepenghuluan Sungai Majo Pusako tidak mau bergabung dengan Kepenghuluan tersebut dan memilih untuk tetap berada dalam wilayah administrasi Kepenghuluan Sungai Majo yang merupakan Kepenghuluan Induk.

Pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo Pusako pada dasarnya adalah dilakukan untuk memenuhi kuota pemenuhan Kepenghuluan untuk Kecamatan Kubu Babussalam yang mekar dari Kecamatan Kubu sebagai Kecamatan Induk. Berbagai spekulasi bermunculan bahwa pemekaran ini dipaksakan, akan tetapi ada yang mengatakan dengan adanya pemekaran, maka pemerataan pembangunan akan lebih muda terwujud terutama bagi Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

## **3. Status Kepemilikan Tanah**

Kantor Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Masih menyewa dari masyarakat sejak tahun 2015-2016. Kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan Kepenghuluan hasil dari pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo. Pada dasarnya syarat untuk bisa mekar dari kepenghuluan sebelumnya adalah dengan memiliki lahan (Kantor Kepenghuluan), sehingga dengan begitu bisa terbentuk Kepenghuluan Defenitif. Sehingga Kantor Kepenghuluan saat ini menggunakan Rumah masyarakat menjadi Kantor Kepenghuluan. Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako mengeluarkan anggaran sewa Kantor Kepenghuluan mulai dari Kepenghuluan itu dibentuk hingga saat ini. Untuk itu perlu adanya upaya Pembangunan Kantor Kepenghuluan Sungai Majo Pusako demi menghemat budget anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dampak pemekaran Kepenghuluan terhadap Pembangunan Infrastruktur

Kepenghuluan Sungai Majo Pusako diantaranya adalah Penyerapan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan sarana perhubungan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako terlaksana dengan baik, Permasalahan Pembangunan sarana pengairan di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako tahun anggaran 2016 lebih diarahkan ke sarana irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian padi masyarakat di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja dan permodalan perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terlebih lagi jika dipandang tidak adanya konsistensi kebijakan yang mendukung sarana pelatihan dan bimbingan, keterampilan kerja dan permodalan, Masyarakat merasakan dampak yang sangat positif yaitu kemudahan dalam mendapatkan bantuan modal usaha. Untuk itu Pelaksanaan pembangunan tidak bisa hanya didasarkan pada keinginan Pemerintah Kepenghuluan tetapi juga harus memperhatikan respon dari masyarakat.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako adalah Konflik batas Wilayah di Kepenghuluan Sungai Majo dengan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako diantaranya adalah mengenai batas tanah, jual beli tanah dan sertifikat tanah, yang semuanya memperebutkan hak atas tanah. Status Kepemilikan, yakni Kantor Kepenghuluan Sungai Majo Pusako Masih menyewa dari masyarakat sejak tahun 2015-2016.

Kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan Kepenghuluan hasil dari pemekaran Kepenghuluan Sungai Majo. Permasalahan infrastruktur di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako menyebabkan terjadinya keluhan dari masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dengan semakin bertambahnya biaya ongkos dan biaya hidup sehari-hari di Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.

## 2. **Saran**

- a. Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya berupaya untuk dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana mengingat kepenghuluan Sungai Majo Pusako merupakan Kepenghuluan baru hasil pemekaran.
- b. Perlu diadakan upaya mandiri bagi masyarakat Kepenghuluan Sungai Majo Pusako untuk mengusahakan infrastruktur pedesaan sebagai pesan kesiapan partisipasi masyarakat dalam menyongsong pembangunan
- c. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir hendaknya mengawal realisasi pengadaan infrastruktur yang tidak mampu di upayakan secara mandiri oleh Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako.
- d. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu mengevaluasi pada Kepenghuluan-kepenghuluan yang telah di mekarkan untuk dicari solusi dalam penyelesaian permasalahan di tingkat Kepenghuluan

- e. Pemerintah Kepenghuluan Sungai Majo Pusako hendaknya mampu menggali potensi Kepenghuluan agardapat meningkatkan Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAK).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Efendy, Arif Roesman. 2008. *Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Summary Report USAID
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- J. Meleong, Lexi. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Koswra. E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian rakyat*. Jakarta : Yayasan Pariba
- M. Tahir Kasnawi, Ramli AT. 2007. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Saragi, Tumpal P. 2004. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa*, IRE Press. Yogyakarta
- Sarundajang. 2005. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sondang P, Siagian. 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, cet. Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nasution, Zulkarnain. 2004. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Harun, H. Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Perundang undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang *Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 26 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Hilir, Kepenghuluan Sungai Majo Pusako, Kepenghuluan Teluk Nilap Jaya, Kepenghuluan Pulau Halang Hulu, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu dan Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir*.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 07 Tahun 209 Tentang *Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kepenghuluan*

*dan Perubahan Status dari  
Kepenghuluan menjadi  
Kelurahan.*

### **Studi Terdahulu**

Imam Sapi'i, Dr. Anastasia Murdyastuti,  
M.Si, M. Hadi Makmur, S.Sos,  
MAP. *Dampak Pemekaran Desa  
Terhadap Pembangunan  
Infrastruktur Desa Pecahan,  
Studi Kasus Pemekaran Desa  
Bagorejo Kecamatan Gumukmas  
Kabupaten Jember.* Jurusan Ilmu  
Pemerintahan, Fakultas Ilmu  
Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Jember (UNEJ)

Nur Lailatul Mubarakah 2016. *Analisis  
Pemekaran Desa Terhadap  
Percepatan Pembangunan  
Infrastuktur (Studi pada Desa  
Ringin putih Kecamatan  
Sampung Kabupaten Ponorogo).*  
Universitas Muhammaiyyah  
Ponorogo

Sella Ayu Wandira Harahap. *Dampak  
Pemekaran Desa dalam  
Pembangunan Infrastuktur (Studi  
Kasus Pada Desa Penampaan  
Uken Kecamatan Blangkejeren  
Kabupaten Gayo Lues.* Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Departemen Ilmu Pemerintahan  
Universitas Sumatera Utara.